KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : HIPMI persoalkan izin pertambangan
Tanggal : Selasa, 11 April 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Curhat Ke Komisi VII

HIPMI Persoalkan Izin Pertambangan

KOMISI VII DPR menerima keluhan dan aspirasi terkait pencabutan dan pembatalan pencabutan IUP (Izin usaha penambangan) dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Mereka adanya Kepastian Hukum untuk IUP yang terkena pencabutan dalam rentang waktu 2020-2022.

Sekjen Badan Pengurus Pusat HIPMI Angga wira mengungkapkan, tidak semua yang terkena pencabutan IUP dikarenakan tidak urus RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Belanja). Dengan kata lain, untuk IUP yang dicabut, tidak ada kejelasan bagaimana memproses untuk mengajukan keberatan atau meminta pembatalan.

Oleh karenanya, ia berharap agar mekanisme dan prosedur pemulihan pencabutan IUP (izin usaha pertambangan) harus diperjelas di dalam peraturan, baik Perpres, PP, ataupun Perppu. Untuk IUP-IUP yang tidak memenuhi syarat pemulihan, harusnya segera dicabut permanen. Karena hal itu tidak berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Sehingga dapat diredistribusi kepada pengusaha nasional lainnya.

"Termasuk perlu segera disusun dan disosialisasikan peraturan mengenai redistribusi IUP yang telah dicabut permanen kepada pengusaha nasional. Diutamakan pengusaha muda nasional yang memiliki komitmen untuk berproduksi, memenuhi target DMO, hilirisasi industri SDA, dan membuka lapangan pekerjaan baru," ujar Angga Wira.

Terkait hal tersebut, Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini menegaskan, akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan oleh HIPMI. Tidak hanya itu, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh HIPMI kepada stakeholder terkait yang merupakan mitra kerjanya di Komisi VII DPR.

Dalam kesempatan itu ada sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh HIPMI. Salah satunya terkait harapannya agar RUU EBET (energi baru dan energi terbaru) dan RUU Migas (Minyak dan Gas) segera diselesaikan.

"Komisi VII DPR mendukung permintaan HIPMI untuk mempercepat diselesaikannya RUU EBET dan RUU Migas. Pasalnya, kedua RUU tersebut sangat berguna sebagai payung hukum kepastian berusaha yang aman dan terarah bagi sektor Energi dan Migas," ujar Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto. ■ KAL